BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

a. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggris digunakan istilah *clerical work, paper work,* atau *officwork* atau administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode pusat, pengetikan, pengandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi.

Administrasi sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern (*social phenomeno*), secara ekplisit tergambar dalam pendapat Waldo (1992;2), yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Batasan administrasi yang menekankan pentingnya aspek rasionalitas juga dikemukakan oleh Siagian (1992;2), yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masing-masing hirarki organisasi tergambar dalam batasan berikut ini. Administrasi adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi,1992;11) terdapat tiga penegrtian substansional yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep admninstrasi tersebut. Diantaranya :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbanagan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa admnistrasi sebagai suatu proses kerja sama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia mengenal perbedaan. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungakapan yang dikemukakan oleh Harbert A. Simont (dalam Siagian, 1986;5), yaitu apabila ada dua orang yang bekerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya oleh seorang diantara mereka, pada saat itu administrasi sudah ada.

Definisi administrasi yang secara inplisit menggambarkan kesepuluh dimensi itu dirumuskan oleh Gie (1993;13). Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kegiatan pokok yang dilakukan oleh segenap kelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajemen (tatapimpingan)
3. Komunikasi (tatahubungan)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatakepegawaian)
6. Finansia (tatakeuangan)
7. Materia (tatapembekalan)
8. Relasi Publik (tatahumas)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Definisi konsep administrasi dalam arti luas bertitik tolak dari pendekatan multi aspek dan dimensi yang melekat dengan aktivias organisasi itu. Pendekatan demikian melatar belakangi beragam redaksionis definisi organisasi yang telah ditulis. Para sarjana dan pakar pemerhatai studi organisasi dalam merumuskan definisi organisasi cenderung untuk tidak terlepas dari perspektif mereka terhadap peranan setiap aspek dan dimensi yang melingkupi organisasi itu. Siagian (1986;7) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentkan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beebrapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Batasan dengan penekanan perlunya hubungan kerja, antara lain dikemukakan oleh Waldo (1986;26). Organisasi merupakan struktur hubungan antara pribadi yang berdasarkan atas wewenag formil dan kebiasaan di dalam suatu sistem organisasi.

Dalam sister kerjasama tersebut disamping diadakan pembagian kerja yang dijabarkan kedalam perincian tugas, menurut Soffer (1973;220) juga diikuti dengan tindakan pendistribusian peranan kepada setiap anggota untuk melaksanakan rincian tugas tertentu dalam rangka upaya menghasilkan beberapa bentuk produk.

b. Konsep Organisasi

Menurut Siagian, (2006;25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab seperti yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005;75) sebagai berikut :

a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan.
b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogen. Untuk terarahnya pencapain tujuan organisasi dibutuhkan daya upaya dari seleruh personil organisasi.
c. Antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan. Artinya, luas dan berat tanggungjawab yang diberi harus sesuai dengan luas dan bertanya tugas.
d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setetpat-tepatnya dan sejelas-jelasnya. Tepat orang, tepat tuggas dan jelas batas-batasannya.
e. Kesatuan komando atau hiraki. Penyusunan organisasi harus mengikuti garis-garis tatahubungan bawahan-atasan.
f. Komunikasi
g. Komunikasi. Kekompakan organisasi tergantung dari komunikasi, yakni pertukaran informasi antara sesama unit kegiatan yang terdapat dalam organisasi bersangkutan.
h. Kewajiban pimpinan utuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya. Pengecekan ini bersifat organisasional, artinya, merupakan bagian integral dari pada kehidupan organisasi.
i. Kontinuitas, artinya pekerjaan tidak boleh mandeg karena seorang berhalangan.
j. Saling asuh antara instansi line dan staf. Hal ini penting sekali terutama didalam organisasi yang sudah mulai kompleks organisasinya.
k. Koordinasi, prinsip ini adalh pelengkap prinsip kedua diatas. Pembagian kerja menimbulkan spesialisasi, spesialisasi mempercepat peningkatan keahlian, akan tetapi mengandung bahaya desintegrasi.
l. Kehayatan, setiap personil harus memandang organisasi seolah-olah hidup (berhayat).
m. Tahu diri pada setiap organisasi. Prinsip ini berhubungan dengan disiplin dan prinsip pembagian kerja, tugas, tanggungjawab dan wewenang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Hicks (2002;12) ada dua macam organisasi : organisasi formal, suatu struktur organisasi yang mempunyai dan dinyatakan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, mempunyai rincian pekerjaan yang jelas bagi setiap anggota mulai dari status, gaji, pangkat, dan penghasilan diatur secara baik. Organisasi formal biasanya tahan lama dan terencana sebab penempatannya sesuai dengan peraturan. Beberapa contoh organisasi formal adalah : perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, dan universitas-universitas.

Organisasi informal : suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan felksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam hal ini organisasi individu atau kelompok-kelompok dengan melakukan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kepentingannya dengan sedemikain rupa dengan memberikan saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang akan dicapai.

c. Konsep Manajemen

Menurut Terry (2006;2) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, penggorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fayol (2002;45) ada 13 azas-azas manajemen antara lain sebagai berikut :

1. Pembagian kerja
2. Wewenang dan tanggung jawab
3. Disiplin
4. Kesatuan perintah
5. Kesatuan arah
6. Kepentingan individu dibawah kepentingan umum
7. Gaji pegawai
8. Sentralisasi
9. Ketertiban
10. Keadilan
11. Kestabilan masa kerja pegawai
12. Inisiatif
13. Kesatuan jiwa kooperatif.

Stoner, et.al. (1996;7), berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

George R. Terry (dalam Sarwoto, 1983;46) mendefinisikan konsep manajmene sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing*, *organizing*, dan *controling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Dua kutipan berikut ini cukup membantu untuk memahami lebih lanjut argumentasi tersebut diatas. Siagian (1986;5) merumuskan batas manajemen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai, kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

d. Konsep Pembinaan

Menurut Santoso (2008;291) mengatakan bahwa pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang direncanakan diperlukan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya bimbingan dari atasan
b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan
c. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja
d. Memberikan penghargaan.

Pembinaan menurut Saydam (2000;7), pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Hidayat (2000;26) mendefinisikan pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Efendi (2003;24) pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi para orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titk maksimal.

Pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, meenurut Efendi (2003;2) ada empat bentuk pembinaan yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Pengarahan
4. Pelatihan

Menurut Ismail (2001;154) mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Pembinaan dilakukan agar semua kinerja dapat mencapai apa yang dicita-citakan organisasi maupun individu. Sedangkan Nurcholis (2011;155) menjelaskan pembinaan camat sebagai kepanjangan bupati Bupati/Walikota kepada desa meliputi :

a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

b.Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

c. Memfasilitasi keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

d. Memfasilitasi urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa

e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

f. Memfasilitasi tugas pelaksanaan kepala desa dan perangkat desa

g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dilembaga kemasyarakatan

i .Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

j. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga

k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desaa

l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga

m.Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

n.Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya Situmorang (1994;176) juga mengemukakan bahwa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan kegairahan kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang bertanggung jawab dan mempunyai nilai yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas.

Karyadi (2003;12) menyatakan bahwa dalam pembinaan terdapat tugas antara lain :

1. Pemberian petunjuk
2. Pemberian pendidikan dan latihan, dan;
3. Pemberian pembimbingan.

Sementara itu Ndraha (1991;166) mengatakan istilah pebinaan menunjukkan pengarahan, pengaturan dan pengisian. Untuk melaksanakan pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentu, yaitu :

1. Pendidikan
2. Latihan
3. Lokakarya (workshop)
4. Bimbingan lapangan (penyuluhan)
5. Penerangan dan diskusi
6. Media cetak dan elektronik
7. Instruksi, dan
8. Teladan

Hal ini disebabkan karena kurangnya bimbingan yang diberikan oleh Camat, sehingga Kepala desa belum mengerti tugas dan fungsinya. Apa lagi adanya perputaran Kepala Desa yang baru, ini dituntun untuk melakukan bimbingan bagai mana seharusnya, dan apa yang akan dilakukan oleh kepala desa yang selanjutnya, inilah guna adanya bimbingan dari Camat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendidikan atau seminarisasi tidak lagi diberikan oleh Camat. Sehingga banyaknya tugas wewenang serta tanggung jawab yang diterlantarkan oleh Kepala Desa, salah satunya ialah tentang kegiatan P2WKSS yang mana disini dipimpin oleh ibuk kepala desa, yang mana membutuhkan pendidikan dan seminarisasi sehingga tau kegiatan apasaja yang dibutuhkan oleh desa dan diselenggarakan dikecamatan tersebut.

Camat kurang memberikan arahannya kepada Kepala kampung mengenani tata cara pembuatan Perdes. Walaupun Kepala kampung telah ditegaskan untuk membuat Perdes, namun masih ada dari sebagian kampung yang tidak mempunyai perdes, dengan alasan semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1. Pemerintah Kampung

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tanun 2014 tentang Kampung pasal 1 ayat (1) Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bintarto (1984;11-12) memberi pengertian tentang Kampung sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lain.

V. C. Finch, (1957) desa pada dasarnya merupakan tempat pemukiman dan bukan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 25 bahwa pemerintahan Kampung adalah penghulu atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat kampung atau disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dibidangnya, bertanggung jawab, dan berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara,2009).

8. Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Pengulu beserta jajarannya memelihara ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayah masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah kampung adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan kenyamanan.

Ketertiban merupakan salah satu sarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes (dalam Rauf, 2005:6) adalah sebagai asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama.

Ciri-ciri ketertiban menurut Soekanto (2001:78) adalah :

a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
b. Kerjasama
c. Pengendalian terhadap kekerasan
d. Kinsistensi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Tahan lama
f. Stabilitas
g. Hierarki
h. Kinformitas
i. Tidak adanya konflik
j. Uniformitas atau keseragaman
k. Gotong royong
l. Didasarkan pada kepatuhan
m. Berpegangan pada tahap yang ditentukan
n. Sesuai dengan pola
o. Tersusun.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharkan ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Dengan demikian bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Menurut Soekanto (2001:79) bahwa keadaan tidak tentram mungkin terjadi, apabila warga masyarakat secara pribadi mengalami :

a. Kekecewaan atau frustasi

b. Konflik

c. Kekhawatiran

Selanjutnya menurut Rauf (dalam Usman 2007:31) bahwa faktor utama untuk tercapainya ketentraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan, rasa dilindungi, dan rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan terjadi apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinayatakan oleh Soejito (dalam Rauf, 2005:69) bahwa istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Menurut Rauf (dalam Jefri 2009:30) ketentraman dan ketertiban yaitu suatu situasi kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastia bebas dari kekuatiran, keraguan dan ketakutan. Dalam mengatasi hal tersebut pimpinan mempunyai cara agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dengan adanya :

a. Perencanaan ketentraman dan keertiban
b. Pengorganisasian ketentraman dan ketertiban
c. Penggerak ketentraman dan ketertiban
d. Pengawasan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah disebut terciptanya suasana tentram.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Konsep Organisasi Pemerintahan camat

1. Pengertian Camat

Menurut Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Camat adalah Kepala Kecamatan. Dari Peraturan Pemerintah tersebut merujuk pada definisi bahwa Camat adalah penyelenggara ditingkat Kecamatan. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Camat adalah pemimpin dan tim kerja perangkat wilayah kecamatan yang bertanggungjawab dilingkungan daerahnya. Dengan demikian Camat merupakan Perangkat Daerah (OPD). Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani urusan daerah.

2. Pengertian Kecamatan

Tugas Pemerintah yaitu mengelola masyarakat dengan sebaik-baiknya. Masyarakat memerlukan pemerintah karena banyak bagian penting dari kebutuhan masyarakat yang tidak semuanya dipenuhi oleh masyarakat ataupun pihak swasta. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 3 disebutkan pembentukan kecamatan harus memeuhi syarat administrative sesuai dengan pasal 4 adalah (a) batas usia penyelenggara pemerintahan minimal lima tahun, (b) batas usia penyelenggara pemerintahan desa atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal lima tahun dan masih banyak syarat lainnya yang mendukung terbentuknya kecamatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

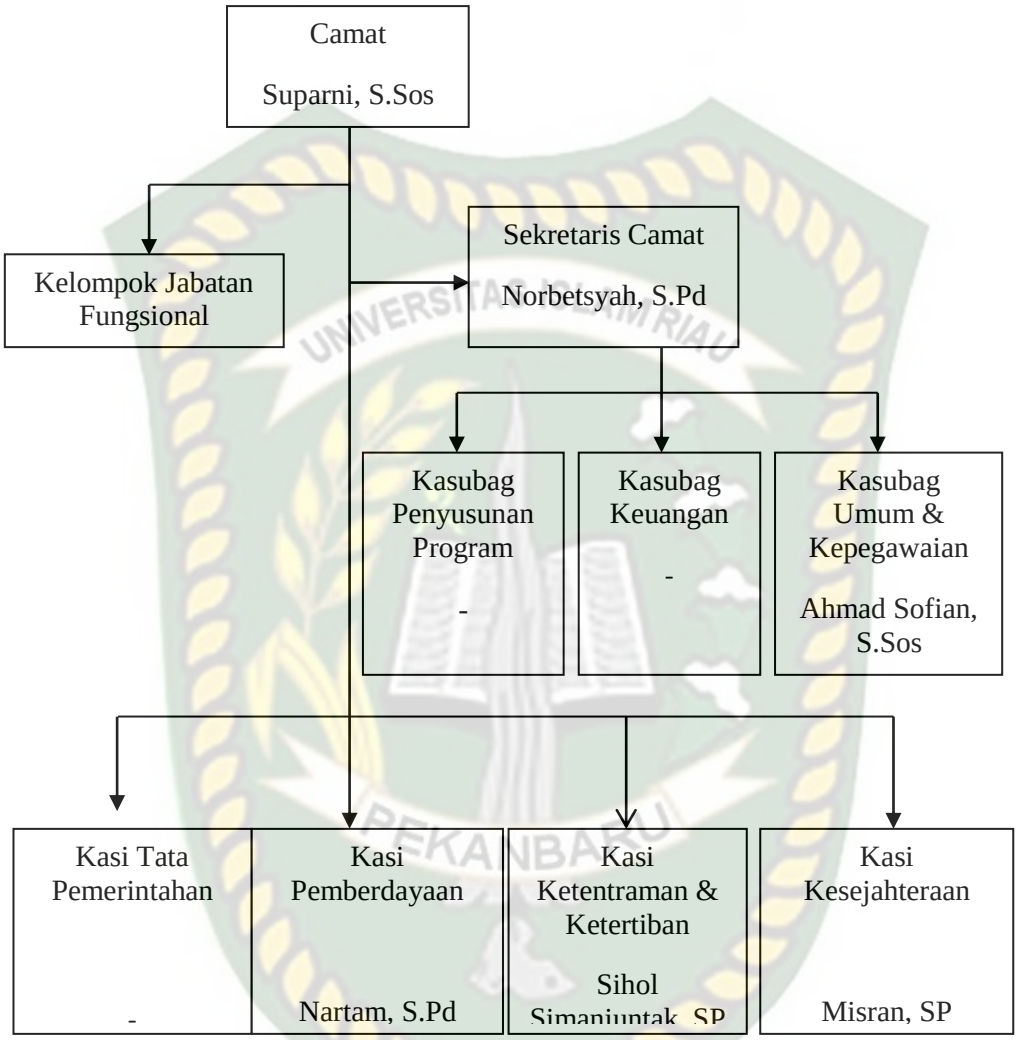

Sumber: Kantor Camat Sabak Auh, 2016

1. Pasal 126 ayat 2, menyatakan bahwa camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani seluruh urusan Otonomi Daerah.
2. Pasal 126 ayat 4, menyatakan bahwa camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 126 ayat 5, menyatakan bahwa Camat bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 :

1. Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
2. Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Tugas-tugas yang diemban Camat menutut Pasal 126 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 adalah :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana/fasilitas pelayanan umum.
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum.
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Diperjelas pada Pasal 21 Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintaha desa dan/atau kelurahan;
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikira

Gambar III.1 : Kerangka Pemikiran penelitian Tentang Pelaksanaa Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung Di Kecmatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Pengulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2017

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya, dalam penelitian ini pasti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut.

Adapun hipotesis yang di susun sebagai jawaban sementara dari hasil penelitian ini adalah : "**Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Penghulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban)"** ditentukan oleh tingkat pelaksanaan indikator sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pengulu dalam melaksanakan tugas kegiatan pengulu diwilayah kerjanya;
2. Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan peraturan kampung diwilayahnya.

D. Konsep Operasioanl

a. Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama Kecamatan hingga Perangkat Kampung.
b. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota
c. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahann kewenangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

d. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di akui dan dihormatii dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
f. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang camat dalam situasi tertentu untuk mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara perorangan ataupun kelompok di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
g. Pembinaan dalam penelitian ini adalah perilaku dan suatu kegiatan yang ditunjukkan oleh Camat Kecamatan Sabak Auh dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa yang meliputi pemberian pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

a. Pemberian Bimbingan

Pemberian Bimbingan maksudnya adalah merupakan pelengkap bagi pedoman tertulis, Camat melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pengertian kepada Kepala Desa agar lebih memahami akan fungsi, kedudukan dan kewajibannya dalam penyelenggaraan kepala desa agar bisa berjalan dengan baik.

Adapun indikasi-indikasinya adalah :

1. Kegiatan yang di ikuti oleh semua Pengulu dan diberikan secara berkala.
2. Peserta kegiatan dapat menerima dan memahami dengan baik atas apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
3. Adanya diskusi tanya jawab antara pembimbing dengan yang dibimbing.

b. Pemberin Pengawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemberian pengawasan yaitu Camat melakukan pemantauan di lapangan terhadap hasil dari kebijaka yang di buat danditerapkan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak baik secara langsung melalui kunjungan maupun tidak langsung dengan meminta laporan hasil kinerja baik secara lisan maupun tulisan. Indikasi tersebut berupa :

1. Pengawasan langsung.
2. Pengawasan tidak langsung.
3. Melakukan evaluasi pada setiap pelaksanaan kebijakan.

c. Pemberian Pengarahan

Pemberian pengarahan yaitu Camat mengarahkan kepada Pengulu agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta Camat juga harus memberikan arahan yang berhubungan dengan pemerintahan kepada Pengulu termasuk didalamnya mengenai keaman dan ketertiban kampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang di ada. Indikasi-indikasinya :

1. Mengumpulkan setiap penyelenggara Pemerintahan Kampung.
2. Memberikan arahan yang berhubungan dengan bidang Pemerintah.

d. Pemberian Pelatihan

Pemberian Pelatihan maksudnya adalah Camat memberikan pelatihan kepada pemerintah kampung baik berupa motivasi, pendidikan, diskusi, dan seminarisasi.

Adapun indikasi-indikasinya adalah:

1. Membuat program pelatihan.
2. Memberi pelatihan tentang cara pembuatan PERKAM dengan baik dan benar.
3. Melaksanakan program yang telah dibuat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR DATA SEKUNDER OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN CAMAT KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG DI KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK (STUDI PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN)

Adapun data sekunder konsep operasional variabel penelitian yang digunakan Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang di tampilkan pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator	Item Penilian	Data Sekunder
1.	Bimbingan	-Kegiatan diikuti oleh semua pemerintah kampunh -Pemerintah kampung dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaiakan -Adanya diskusi dan tanya jawab	-Musrembang Kampung terdiri dari : -masalah kemiskinan -pendidikan -kesehatan Prasarana - pengangguran
2.	Pengawasan	-Mengevaluasi terhadap tugas dan fungsi pemerintah kampung -Melakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang ada -Hambatan yang dialami dalam membina pemerintah kampung	-RPJM kamapung -memberikan sosialisasi tentang : dasar hukum, manfaat, tujuan. Perlengkapan : undangan, daftar nama, daftar hadir, notulen, berita acara, dan foto.
3.	Pengarahan	-Meningkatkan tanggung jawab terhadap masalah yang timbul -Memberikan arahan mengenai tugas pemerintah kampung	-Tertib administrasi kampung, peraturan-peraturan kampung tentang perjudian, kekerasan, pencurian dan lain-lain.
4.	Pelatihan	-Membuat program pelatihan -Perangkat kampung diberi pelatihan cara pembuatan Perdes dengan baik dan benar -Melaksanakan program yang telah dibuat	-Pembuatan peraturan kampung -pelatihan administrasi kampung -pelatihan SDM kampung Difasilitasi kecamatan seperti : uang, buku tulis dan lain-lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Dalam mewujudkan sebuah penelitian, maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realisasi dan konsep operasional dan juga mempermudah hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep. Dan dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk melakukan suatu penelitian dari sebuah konsep yang telah ditampilkan dibawah.

Tabel III.1: Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Penghulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi para orang perorangan, kelompok maupun dalam bidang aspek kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang politik, sehingga	Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Penghulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban)	Bimbingan	-Kegiatan diikuti oleh semua pemerintah kampunh -Pemerintah kampung dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaiakan -Adanya diskusi dan tanya jawab	Terlaksana Kurang Terlaksana Cukup Terlaksana
		Pengawasan	-Mengevaluasi terhadap tugas dan fungsi pemerintah kampung -Melakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang ada -Hambatan yang dialami dalam	Terlaksana Kurang Terlaksana Cukup Terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal. Efendi (2003;2)			membina pemerintah kampung	
		Pengarahan	-Meningkatkan tanggung jawab terhadap masalah yang timbul -Memberikan arahan mengenai tugas pemerintah kampung	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Pelatihan	-Membuat program pelatihan -Perangkat kampung diberi pelatihan cara pembuatan Perdes dengan baik dan benar -Melaksanakan program yang telah dibuat	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang terlaksana

Sumber :Modifikasi Peneliti, 2017

E. Teknik Pengukuran

Setelah ditemukan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran Variabel dan Indikator Variabel Pembinaan, maka teknik tersebut adalah sebagai berikut :

Terlaksana : apabila semua kriteria indikator pembinaan terlaksana dengan ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Terlaksana : apabila semua kriteria indikator terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang Terlaksana : apabila semua kriteria indikator dengan ukuran <34% dari jawaban responden.

Adapun untuk indikator pembinaan teknik pengukurannya sebagai berikut :

1. Pemberian Bimbingan

Terlaksana :apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Cukup Terlaksana :apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang Terlaksana :apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden

2. Pemberian Pengawasan

Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Cukup Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden

3. Pemberian Pengarahan

Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden

4. Pemberian pelatihan

Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Cukup Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :